

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan kerap kali dihubungkan dengan adanya perubahan pada struktur perekonomian, dengan pergeseran struktur perekonomian dari pertanian menuju industri. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang merupakan potensi ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur suatu daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam tersebut dapat meliputi sektor pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya manusia yang dimaksud tidak hanya mencakup jumlah penduduk dan pekerja melainkan termasuk kualitas penduduk.

Negara Indonesia sering menghadapi berbagai permasalahan dalam proses pembangunan, seperti masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah kependudukan yang dihadapi adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang tinggi dengan distribusi persebaran yang tidak merata. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi, jumlah penduduk yang besar dan berkualitas rendah akan menjadi beban atau masalah dalam pembangunan (Sukirno, 2013). Masalah di bidang kependudukan hampir dapat dipastikan akan menimbulkan masalah di bidang ketenagakerjaan. Fenomena penduduk dengan usia muda dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja yang semakin bertambah.

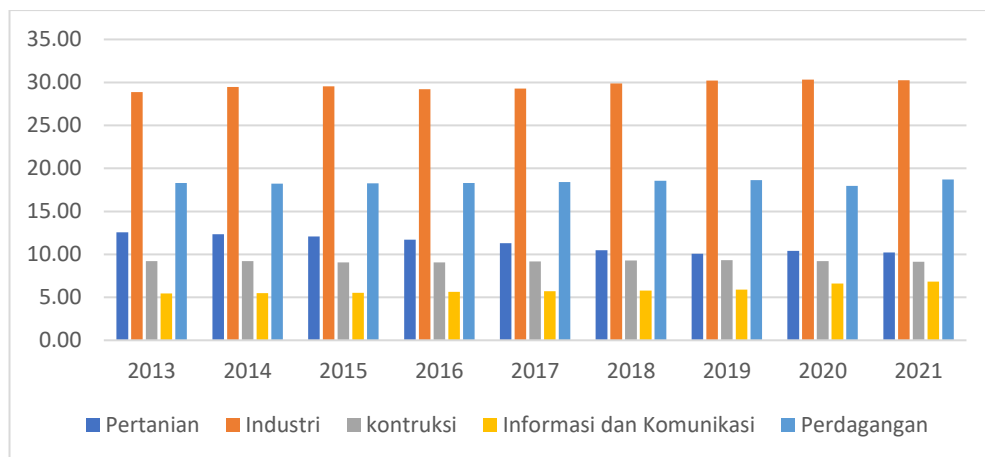
Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan komponen yang paling signifikan dan paling berpengaruh dalam pengelolaan dan pengendalian sistem ekonomi. Dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terpenting adalah sumber daya manusia, dalam teori klasik yaitu para ekonom Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx, mengemukakan salah satu penentu dalam proses produksi adalah sumber daya manusia. Teori tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mankiw, yaitu faktor utama dalam pertumbuhan suatu wilayah ialah sumber daya manusia (Mankiw, 2006).

Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu mencapai 60% dari total penduduk di Indonesia. BPS menyebutkan bahwa kontribusi PDRB Pulau Jawa tahun 2021 cukup besar dalam perekonomian nasional yaitu sebesar 58,49 persen. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar kegiatan ekonomi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Kondisi geografis yang menguntungkan, jalur perdagangan internasional dan infrastruktur yang memadai menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi yang utama.

Jawa Timur merupakan provinsi terluas di pulau Jawa dengan luas 47,79975 meter persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 40.878.789 jiwa yang menempati peringkat kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48 juta jiwa. Selain itu, Jawa Timur menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dalam kontribusi PDRB di Pulau Jawa yaitu sebesar 24,93 persen. BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,55 persen yang melampaui provinsi lain di Pulau Jawa, antara lain DKI Jakarta yang hanya tumbuh 6,11 persen, Jawa Barat 6,06 persen dan Jawa Tengah 5,81 persen. Tahun 2013-2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan yang tentunya juga diiringi dengan

pembangunan ekonomi yang baik pula. Provinsi Jawa timur menurut kementerian Dalam Negeri terdapat 38 kota/kabupaten administratif Selain potensi ekonomi yang beragam, Jawa Timur juga dihadapkan pada permasalahan angka populasi yang tinggi

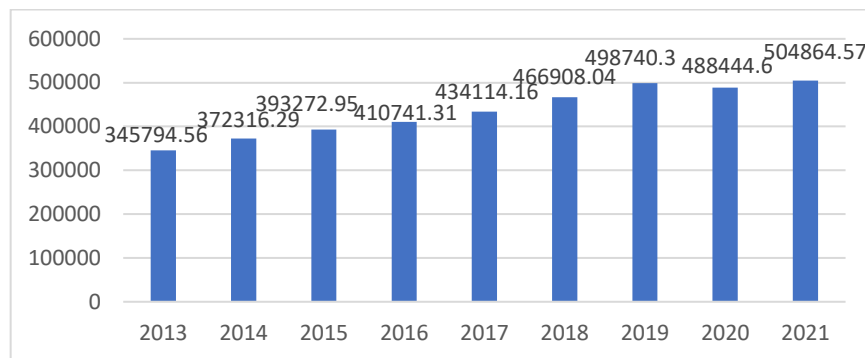
Ketersediaan sumber daya alam Jawa Timur yang melimpah dapat dijadikan sebagai bahan baku seperti pertanian, kehutanan dan perikanan yang baik bagi sektor industri dalam aspek ketersediaan bahan mentah. Industri pengolahan merupakan *leading sector* dalam perekonomian Jawa Timur.



Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur di olah tahun 2021

Gambar 1.2 menunjukkan kontribusi sektor perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kontribusi sektor tertinggi di Jawa Timur dari tahun 2013-2021 adalah sektor Industri pengolahan. Pada tahun 2021 kontribusi sektor industri sebesar 30,25 persen, pada posisi kedua adalah sektor Perdagangan Besar yaitu sebesar 18,72 persen, posisi ketiga adalah sektor pertanian yaitu sebesar 10,22 persen, posisi ke empat adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 9,13 persen, dan posisi ke lima adalah sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 6,83 persen.



Gambar 1. 3 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur Tahun 2013-2021 Dalam Miliar

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2021

Dari grafik 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata PDRB sektor Industri Pengolahan Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2021. Pada tahun 2013 PDRB sektor Industri Pengolahan Jawa Timur sebesar 345794.56 Miliar mengalami peningkatan pada tahun setelahnya tahun 2014 menjadi 372316.29 miliar. Hingga pada tahun 2021 PDRB sektor Industri Pengolahan Jawa Timur sebesar 54864.57 miliar.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Berkerja Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Pekerjaan	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.16	34.55	33.20	31.74	31.86	30.72	31.28	33.01	31.68
Industri Pengolahan	12.94	13.02	13.56	13.24	13.31	14.04	15.85	14.62	15.12
Konstruksi	6.00	6.10	6.38	6.39	5.75	5.56	7.19	6.72	6.42
Perdagangan	21.80	21.84	22.05	23.62	23.37	18.46	17.98	18.49	19

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur pada tahun 2013-2021 mayoritas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2013 sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 35.16

persen. Hal ini berbeda jauh dengan tahun setelahnya, yaitu tahun 2021 sebesar 31.68 persen. Sementara itu sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap tenaga kerja pada tahun 2013 sebesar 12.94 persen, kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 15.12 persen. Sektor industri pengolahan memiliki Daya serap tenaga kerja dibawah sektor perdagangan yang pada tahun 2021 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 19 persen.

Tabel 1. 2 Output Provinsi Jawa Timur 2021 (Juta Rupiah)

Sektor Perekonomian	Total Output
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	278359110.2
Pertambangan dan Penggalian	114522197.6
Industri Pengolahan	1237843510
Pengadaan Listrik Gas	89613177.8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	2822479.461
Konstruksi	396427934.8
Jasa Lainnya	75885705.49

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2021

Kontribusi PDRB industri pengolahan tidak dapat memberikan dampak signifikan kepada masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Fenomena ini tercermin dari mayoritas penduduk Jawa Timur bekerja di sektor pertanian yang memiliki nilai output lebih rendah jika dibandingkan dengan output industri pengolahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Simanjuntak (2008), menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan unit usaha.

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menjadi tolak ukur pencapaian pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi di suatu daerah dapat mengindikasikan bahwa terdapat banyak kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan masyarakatnya hidup lebih sejahtera (Tangkilisan, 2007). Oleh karena itu, PDRB perkapita yang semakin meningkat secara teoritis mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2022) menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Jawa Timur Tahun 2013-2021

Tahun	PDRB ADHK (Miliar)	Pertumbuhan Ekonomi
2013	1192790	6.08%
2014	1262685	5.86%
2015	1331376	5.44%
2016	1405564	5.57%
2017	1482300	5.46%
2018	1563442	5.47%
2019	1649896	5.53%
2020	1611508	-2.33%
2021	1669117	3.57%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2013-2021. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6.08 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu sebesar -2.33 persen, angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kontraksi yang terjadi di Indonesia

yaitu sebesar -2.07 persen. Kontraksi tersebut tidak berlangsung lama hingga pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 3.57 persen.

Tabel 1. 4 Jumlah Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2021

Tahun	Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
2013	803.454	3.115.680
2014	807.478	3.133.049
2015	811.273	2.770.768
2016	813.140	2.800.896
2017	814.843	3.131.790
2018	816.804	3.247.537
2019	816.756	3.333.939
2020	821.780	3.065.447
2021	827.563	3.181.246

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Jumlah industri juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Bertambahnya jumlah industri dapat menarik lebih banyak tenaga kerja. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai pengaruh jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti *et al* (2021) dan Anjani *et al* (2022) hasilnya adalah jumlah unit usaha memperlihatkan adanya pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga. Tabel 1.4 menunjukkan jumlah industri di Provinsi Jawa timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang mulanya sebesar 803.454 unit di tahun 2013 menjadi 807.478 unit di tahun 2014. Kemudian, pada tahun 2015 bertambah sebesar 811.273 hingga pada tahun 2021 sebesar 827.563 unit.

Menurut teori Lewis yang mengungkapkan bahwa angkatan kerja berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, ketika terjadi kelebihan tenaga

kerja merupakan sebuah kesempatan dan bukan merupakan sebuah masalah, karena kelebihan tenaga kerja suatu sektor akan berperan dalam penyediaan tenaga kerja di sektor lain (Mulyadi, 2008).

Tabel 1. 5 Jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Timur 2013-2021

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	TPT
2013	20432453	19553910	4.3%
2014	20149998	19306508	4.19%
2015	20274681	19367777	4.47%
2016	19953846	19114563	4.21%
2017	20937716	20099220	4%
2018	21300423	20499949	3.99%
2019	21499386	20655632	3.82%
2020	22264112	20962967	5.84%
2021	22319145	21037750	5.74%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Jumlah angkatan kerja menjadi determinan penyerapan tenaga kerja, dimana kategori yang digunakan meliputi jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun, baik yang bekerja yang sedang mencari pekerjaan. Tabel 1.5 menunjukan jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2021 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang telah bekerja. Jumlah angkatan kerja akan menggambarkan ketersediaan sumber daya manusia pada suatu daerah.

Permintaan akan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Menurut Susilowati & Wahyuni (2019), upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, namun bersifat negatif, artinya jumlah tenaga kerja akan semakin berkurang seiring dengan kenaikan upah. Teori klasik menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja bergantung pada tingkat upah, dimana upah yang

semakin rendah akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dalam sebuah perekonomian (Jhingan, 2012). Dalam menetapkan tingkat upah minimum, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi agar dapat dicapai keseimbangan antara *demand* dan *supply* pada pasar tenaga kerja (Mankiw, 2003).

Tabel 1. 6 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa 2017-2021 (Rupiah)

PROVINSI	UMP				
	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	3,355,750	3,648,036	3,940,973	4,276,350	4,416,186
Jawa Barat	1,420,624	1,544,361	1,668,373	1,810,351	1,810,351
Jawa Tengah	1,367,000	1,486,065	1,605,396	1,742,015	1,798,979
Jawa Timur	1,337,645	1,508,895	1,630,059	1,768,777	1,868,777
DI Yogyakarta	1,367,000	1,454,154	1,570,923	1,704,608	1,765,000
Banten	1,931,180	2,099,385	2,267,990	2,460,997	2,460,996

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Tabel 1.6 menunjukan bahwa UMP Jawa Timur selama 2017-2021 terus mengalami peningkatan. UMP Jawa Timur pada tahun 2021 berada diperingkat ketiga di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dan Banten yaitu sebesar Rp. 1.868.777. Sementara DKI Jakarta sebesar Rp. 3.416186 dan Banten sebesar Rp 2.460.996. provinsi Jawa Barat ada diposisi ke empat yaitu sebesar Rp. 1.810.351, diposisi ke lima provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 1.798.979, dan diposisi terakhir adalah DIY yaitu sebesar Rp. 1.765.000.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi saja melainkan juga dari dampak yang diberikan terhadap peningkatan kualitas manusia. Kualitas angkatan kerja dapat terlihat berdasarkan tingkat pendidikannya, dengan adanya proses pendidikan maka *skill* manusia dapat meningkat hal ini didasari oleh teori human capital oleh Becker (Yulistiyono, *et al.*,

2021). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mempengaruhi kualitas seseorang, terutama dalam hal bekerja. Semakin tinggi kualitas hidup manusia, maka semakin tinggi pula produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan.

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk menaksir tingkat pendidikan masyarakat suatu wilayah salah satunya melihat dari rata-rata lama sekolah. Tingkat rata-rata lama sekolah yang makin tinggi mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan yang dijalani seseorang. Tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh maka dapat berarti semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki seseorang dalam melakukan upaya peningkatan produktivitas kerja. Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawan *et al* (2023) yang mengemukakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan paparan latar belakang, potensi ekonomi yang besar bagi perekonomian Jawa Timur adalah industri pengolahan. Besarnya potensi dari sektor industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Namun, meningkatnya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan pengangguran meningkat pula. Seiring dengan masih fluktuatifnya kondisi perekonomian di Jawa timur. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Jumlah Industri, Angkatan Kerja, UMK dan Tingkat Pendidikan secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja Sektor Industri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2021?
2. Bagaimana pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Jumlah Industri, Angkatan Kerja, UMK dan Tingkat Pendidikan secara simultan terhadap penyerapan tenaga Sektor Industri kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Jumlah Industri, Angkatan Kerja UMK dan Tingkat Pendidikan secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja Sektor Industri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2021
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB Sektor Industri Pengolahan, Jumlah Industri, Angkatan Kerja, UMK dan Tingkat Pendidikan secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja Sektor Industri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pengembang Ilmu

Mampu dalam memberikan kontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya, serta menambah informasi dan sumbangan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya. Khususnya pada bidang ilmu ekonomi makro.

2. Praktis

Sebagai bahan referensi dan sarana dalam menentukan pengambilan kebijakan yang tepat yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur